

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERENCANAAN DAN
REALISASI ANGGARAN PEMBANGUNAN DESA POLEWALI
KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**

*Analysis Of Factors Affecting The Planning And Budget Realization Of
The Development Of Polewali Village, Suppa District, Pinrang Regency*

Darmawan ¹, Muh.Sofyan Solihin ²

Email : : darmawan8387@gmail.com ¹, muhammedsofyan30@gmail.com ²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No.Km.6, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi
Selatan Kode Pos 91131

Abstrak

Salah satu bentuk partisipasi dalam perencanaan penganggaran adalah menghadiri Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau dikenal dengan istilah Musrenbang. Musrenbang diharapkan menjadi wadah dalam menetapkan prioritas pembangunan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat tercapai melalui pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan dan realisasi anggaran pembangunan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa arah kebijakan umum, data masa lalu, perubahan kondisi ekonomi hingga kondisi politik dan kebutuhan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi rencana anggaran pada Desa Polewali Kecamatan Suppa. faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran ialah proses pencairan dana yang panjang sehingga berdampak pada lambatnya pengerjaan program yang telah direncanakan pada anggaran tahun 2018, 2019, dan 2020 di Desa Polewali Kecamatan Suppa.

Kata kunci : Perencanaan, realisasi, anggaran

Abstract

One form of participation in budget planning is attending the Development Planning Deliberative Forum or known as Musrenbang. Musrenbang is expected to be a forum for setting development priorities so that what the community needs can be achieved through development. This study aims to determine the factors that influence the planning and realization of the development budget in Polewali Village, Suppa District, Pinrang Regency. The data collection technique used interviews. The analytical technique used is descriptive qualitative analysis. Based on the results of research conducted that the direction of general policy, past data, changes in economic conditions to political conditions, and community needs are factors that influence the budget plan in Polewali Village, Suppa District. The factors that affect the realization of the budget are the long process of disbursing funds so that which has an impact on the slow progress of the program that has been planned for the 2018 2019 and 2020 budgets in Polewali Village, Suppa District.

Keywords: Planning, realization, budget

PENDAHULUAN

Bastian (2006) mendefinisikan anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang di usulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Mardiasmo (2009) mengemukakan definisi anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), kewajiban menyusun perencanaan pembangunan ditegaskan dalam pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan proses perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta *top down* (atas-bawah) dan *bottom up* (bawah-atas).

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan penganggaran daerah (APBD) dalam konteks Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59/ 2007 tentang Perubahan Permendagri No.13/2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, UU No.25/2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Surat Edaran Bersama Bappenas dan Mendagri No. 1354/M.PPN/03/2004050/744/SJ tentang Pedoman Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Perencanaan Partisipatif Daerah (Sopannah, 2012).

Selain partisipasi masyarakat dalam proses APBD, prinsip-prinsip lain dalam penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas serta taat azas juga harus diperhatikan. Fakta di lapangan berdasarkan hasil penelitian Sopannah (2003) partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih sangat kecil bahkan hampir tidak ada, padahal partisipasi masyarakat akan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD (Sopannah, 2012).

Salah satu bentuk partisipasi dalam perencanaan penganggaran adalah menghadiri Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau dikenal dengan istilah Musrenbang. Musrenbang dalam penyusunan APBD dilaksanakan melalui mekanisme dan tahapan secara berjenjang yang diawali dari tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Musrenbang diharapkan menjadi wadah dalam menetapkan prioritas pembangunan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat tercapai melalui pembangunan (Sopannah, 2012).

Hasil dan proses Musrenbang yang berjenjang tersebut adalah tersusunnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran SKPD (KU APBD-PPAS), Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA-SKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD. Dengan demikian, untuk menjamin terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran dalam konteks penyusunan Rancangan APBD, maka setiap Pemerintah Daerah melakukan perbaikan proses dan mekanisme Musrenbang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di Kecamatan Suppa telah dilakukan berdasarkan mekanisme *bottom-up* dimana masyarakat secara langsung terlibat dalam penyusunan anggaran dengan cara melaksanakan musyawarah rencana pembangunan (musrempang). Namun pada pelaksanaannya realisasi anggaran pada Desa Polewali Kecamatan Suppa terkadang belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dengan waktu penelitian selama tiga bulan dimulai pada bulan Desember hingga Februari tahun 2020. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak H. Muh.Tahang selaku Kepala Desa Polewali dan Bapak Muh. Arsyad S.E. selaku

Sekretaris Desa Polewali, serta dan para staf yang mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan objek permasalahan yang sedang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data yang diperoleh selama melakukan penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode pengolahan data dari penggolongan data, dimana data keterangan dan dokumen-dokumen diolah serta diuraikan, berdasarkan data-data non- kuantitatif (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara serta pengamatan langsung pada Desa Polewali Kecamatan Suppa. Pihak yang menjadi sumber informasi dalam melaksanakan wawancara pada Desa Polewali Kecamatan Suppa adalah Bapak Muh. Arsyad S.E. selaku Sekretaris Desa Polewali.

Dari hasil wawancara dan pengamatan maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Kecamatan Suppa dalam menentukan anggaran pembangunan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Umum Pembangunan

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan maka diperoleh informasi bahwa hal yang diperhatikan dan faktor yang menentukan jumlah anggaran pembangunan Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang adalah arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Penyusunan anggaran rencana pembangunan Desa Polewali Kecamatan Suppa akan melakukan koordinasi kepada satuan kerja perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan tujuan agar anggaran yang disusun sesuai dengan arah kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam hal ini kebijakan Bupati Pinrang.

Bapak Muh. Arsyad S.E. menyatakan bahwa “sebagai contoh jika Bupati Kabupaten Pinrang pada tahun tertentu memfokuskan kebijakan pertanian sebagai program prioritas maka tentu hal tersebut akan berdampak pada penyusunan anggaran pertanian di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Jumlah anggaran pertanian Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang akan jauh lebih ditingkatkan dibandingkan jika Bupati Kabupaten Pinrang tidak fokus pada program pertanian dalam skala prioritas kebijakannya”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan memiliki peran dalam membantu Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas Pemerintah. Dimana kecamatan sebagai perangkat daerah merupakan organisasi terdepan dalam memberikan pelayanan publik.

2. Data Masa Lalu

Faktor berikutnya yang menentukan dalam menentukan anggaran sektor pembangunan Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dari hasil pengamatan dan wawancara langsung yang penulis lakukan dalam penelitian yaitu faktor data masa lalu.

Data masa lalu menjadi salah satu faktor yang dapat menentukan perencanaan anggaran pembangunan di Desa Polewali karena hal tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap rencana anggaran pembangunan yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang.

3. Perubahan Kondisi Ekonomi

Faktor selanjutnya yang menentukan dalam penyusunan anggaran sektor pembangunan di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menurut informan penelitian yaitu perubahan kondisi ekonomi baik secara regional maupun ekonomi secara nasional.

Perubahan ekonomi memungkinkan berdampak pada penyusunan anggaran dalam hal ini anggaran pertanian pada Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Apabila pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan atau terjadi gejolak maka akan berdampak pada ketersediaan anggaran atau dari sisi pengeluaran pemerintah.

Contoh jika terjadi gejolak ekonomi yang menyebabkan terjadinya inflasi maka hal tersebut akan mengakibatkan kenaikan harga barang secara umum, tentunya hal tersebut berdampak pada penyusunan anggaran karena inflasi yang terjadi diluar batas toleransi anggaran yang ditentukan.

Menurut informan penelitian, perubahan kondisi ekonomi ini sangat menentukan dalam proses penyusunan anggaran pembangunan Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang karena menyangkut dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan pemerintah dalam memprediksi laju pergerakan perekonomian.

Contoh ketika kondisi ekonomi mengalami ketidakstabilan akibat wabah Corona maka tentunya hal ini akan berdampak langsung pada perencanaan anggaran pembangunan daerah termasuk di Desa Polewali. Dengan kondisi pandemic maka tentunya anggaran-anggaran sebagian akan dialihkan untuk penanganan pandemic yang akan berdampak pada perencanaan anggaran termasuk pada Pemerintah Kecamatan Suppa.

4. Kondisi Politik

Menurut informan penelitian adalah kondisi politik, kondisi politik saat ini telah menjadi variabel yang diperhitungkan Pemerintah Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam menyusun anggaran pembangunan. Kondisi politik yang dimaksud misalnya adanya pemilihan kepala daerah, legislatif maupun pemilihan presiden.

Secara historis biasanya pada saat terjadi tahun politik maka akan terjadi perlambatan realisasi anggaran kata informan penelitian, hal ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menyusun anggaran agar memperhitungkan betul efek yang ditimbulkan dari faktor politik yang akan terjadi dikemudian hari.

Responden mengungkapkan bahwa dalam menyusun anggaran dalam hal ini anggaran sektor pembangunan Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang maka betul-betul harus diperhitungkan secara matang faktor-faktor yang menentukan jumlah anggaran yang akan diusulkan tersebut.

5. Kebutuhan Masyarakat Desa Polewali

Faktor selanjutnya yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran di Desa Polewali adalah kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam proses penyusunan anggaran di Kecamatan Suppa selalu melibatkan partisipasi aktif masyarakat, musyawarah rencana pembangunan desa merupakan salah satu wadah yang diberikan kepada masyarakat untuk ikut andil dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Musyawarah rencana pembangunan desa masyarakat bisa memberikan usulan tentang apa saja yang perlu menjadi perhatian. Pemerintah Kecamatan dalam penyusunan anggaran dan program. Musyawarah rencana pembangunan desa dilakukan agar seluruh program yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran merupakan program yang merepresetasikan kebutuhan riil masyarakat.

Pemerintah Desa Polewali Kecamatan Suppa memberikan penegasan bahwa kebutuhan masyarakat merupakan prioritas yang penting dalam penyusunan anggaran dan program sebab dalam prosesnya masyarakat selalu turut aktif dalam memberikan masukan serta pengawasan terhadap perencanaan program pembangunan di Desa Polewali.

Faktor-faktor Realisasi Anggaran Desa Polewali Kecamatan Suppa

Tabel 1 Realisasi Anggaran Desa Polewali Kecamatan Suppa Pada Bidang Pembangunan Tahun 2018

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
No.	Uraian	Anggaran
1	Penimbunan jalan Tani Ladea	Rp.119.643.500
2	Penimbunan jalan Pendidikan 231 Ladea	Rp.122.090.500
3	Pembuatan Talud Jalan Lingkar Polewali Kulo	Rp.152.022.000
4	Pembuatan Talud jalan Lingkar Bela-Belawa	Rp.232.278.400
5	Pembuatan Duekker Bela-Belawa	Rp.10.295.100
6	Pembuatan Jembatan Tani 2 Unit	Rp.68.151.800
7	Penimbunan Dusun Polewali	Rp.57.908.900
JUMLAH		Rp.762.391.000

Sumber : Kantor Desa Polewali, Diolah Tahun 2021

Tabel 2 Realisasi Anggaran Desa Polewali Kecamatan Suppa Pada Bidang Pembangunan Tahun 2019

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
No	Uraian	Anggaran
1	Sub Bidang Kesehatan	Rp.36.175.000
	- Penyelenggaraan Posyandu	Rp.18.000.000
	- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp.18.175.000
2	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.665.213.200
	- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman	Rp.402.017.100
	- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Rp.23.405.000
	- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	Rp. 54.388.300
	- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	Rp.185.402.800
3	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp.591.090.800
	- Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Rp.505.316.200
	- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum,dll	Rp.85.774.600
4	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp.7.682.500
	- Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	Rp.7.682500
JUMLAH		Rp.1.300.161.500

Sumber : Kantor Desa Polewali, Diolah Tahun 2021

Tabel 3 Realisasi Anggaran Desa Polewali Kecamatan Suppa Pada Bidang Pembangunan Tahun 2020

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		
No	Uraian	Anggaran
1	Sub Bidang Pendidikan	Rp.71.009.000
	- Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	Rp.7.200.000
	- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	Rp.63.809.000
2	Sub Bidang Kesehatan	Rp.101.637.200
	- Penyelenggaraan Posyandu	Rp.21.500.500
	- Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Rp.6.500.000
	- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Rp.73.637.200
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.638.598.150
	- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Rp.570.749.800
	- Pembinaan PKK	Rp.6.000.000
JUMLAH		Rp.1.070.653.750

Sumber : Kantor Desa Polewali, Diolah Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing. Kebutuhan dan program prioritas setiap daerah akan dituangkan dalam anggaran sebagai alat perencanaan pemerintah daerah.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja lembaga/organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik (biasanya dalam periode tahunan) yang berisi program dan kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Parepare. APBD merupakan alat untuk mendanai program-program kerja Pemerintah yang telah ditetapkan sehingga proses penyusunan hingga pelaksanaan APBD harus mampu memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Tingkat penyerapan anggaran akan mencerminkan sejauh mana program-program Pemerintah mampu dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tingginya tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana APBD telah direalisasikan untuk kepentingan rakyat melalui program-program Pemerintah, sebaliknya jika tingkat penyerapan anggaran rendah maka hal tersebut menunjukkan bahwa dana APBD belum secara maksimal dinikmati oleh masyarakat disebabkan masih banyaknya program Pemerintah yang belum terealisasi.

Menurut Bapak Muh. Arsyad S.E. faktor yang mempengaruhi tingkat realisasi anggaran Desa Polewali Kabupaten Pinrang adalah rumitnya proses pencairan dana untuk sebuah program, setiap program yang ingin direalisasikan harus melewati beberapa proses tahapan yang panjang sehingga dana yang telah dianggarkan dapat terealisasi.

Tahapan persiapan yang seringkali menghambat percepatan realisasi anggaran antara lain proses tender atau lelang yang lambat dalam menentukan kontraktor yang berhak melaksanakan suatu proyek pemerintah. Hal yang menyebabkan proses tender atau lelang melambat yaitu karena banyaknya peserta tender yang lambat dalam memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku sehingga menyebabkan jadwal selalu mundur dari yang telah direncanakan sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi rencana anggaran pada Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang antara lain; arah kebijakan umum Kabupaten Pinrang yang merupakan kebijakan Bupati Pinrang dalam memfokuskan perencanaan anggaran dalam sektor tertentu; data masa lalu merupakan kejadian masa lalu yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya; perubahan kondisi ekonomi karena menyangkut dengan ketersediaan anggaran dan kesiapan pemerintah dalam memprediksi laju pergerakan perekonomian; kondisi politik dimana secara historis biasanya terjadi perlambatan penyusunan anggaran pada tahun politik; kebutuhan masyarakat Desa Polewali dimana musrembang dilakukan agar seluruh program yang ditetapkan merupakan kebutuhan riil masyarakat.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi anggaran pada Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang antara lain adanya proses pencairan dana yang panjang sehingga berdampak pada lambatnya pengerjaan program yang telah direncanakan pada anggaran tahun 2018, 2019, dan 2020.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka penulis berharap agar Pemerintah Kabupaten Pinrang memberikan perhatian yang lebih pada pembangunan Desa Polewali Kecamatan Suppa sehingga mampu mengantisipasi hal-hal yang dapat

menghambat proses pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2002. *"Perencanaan Pembangunan Daerah Partisipatif"*. Yogyakarta Penerbit pembaharuan.
- Adisasmita, Rahardjo. 2008. *"Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori"*. Penerbit Graha Ilmu. Jakarta.
- Anak Agung Ayu, Piers Andreas, Ni Wayan Supriyanti. 2014. *"Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(Studi Kasus Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar)"*. Universitas Udayana.
- Bastian. 2006. *"Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar"*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Conyers, Diana. 1992. *"Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga (Penterjemah Susetiawan)"*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Deddi Nordiawan. 2006. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Erwin Ismatuddin Gutawa. 2011. *"Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Realisasi Belanja Daerah di Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangk Belitung"*. Jurnal Universitas Gadjah Mada.
- Handoko, T. Hani. 2003. *"Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia"*. Yogyakarta: BPFE.
- Halim, Abdul. 2012. *"Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah"*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Harun. 2010. *"Perencanaan Wilayah Kota"*. Universitas Islam Bandung. Jurnal Vol. 1 No. 10.
- Kaho, Riwu. 2005. *"Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah"*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Nafarin. 2007. *"Penganggaran Perusahaan"*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *"Akuntansi Sektor Publik"*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2013. *"Perpajakan Edisi Revisi"*. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2012. *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Ruwaida, Darwanis, Syukriy Abdullah. *"Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Anggaran Belanja Pendidikan Di Provinsi Aceh"*. Jurnal Universitas Syiah Kuala.
- Sandra Kurniawati. 2014. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota A SAPPK V1N1.
- Sugiyono. 2011. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, AFABETA, Bandung.
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit Bumi Aksara.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
Waluyo. 2013. "*Perpajakan Indonesia*". Salemba Empat, Jakarta.
- Widodo, Tri. 2006. "*Perencanaan Pembangunan. Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*". UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Wrihatnolo, Dwidjowijoto. 2006. "*Manajemen Pembedayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*". PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Yuwono, Sony. 2005. "*Penganggaran Sektor Publik*". Bayumedia Publishing. Muhammad Arsyad. 2019. "*Analisis Efektivitas dan Efisiensi Alokasi Dana Desa Pada Pembangunan Infrastruktur di Desa Polewali Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*". UM Parepare. Parepare.